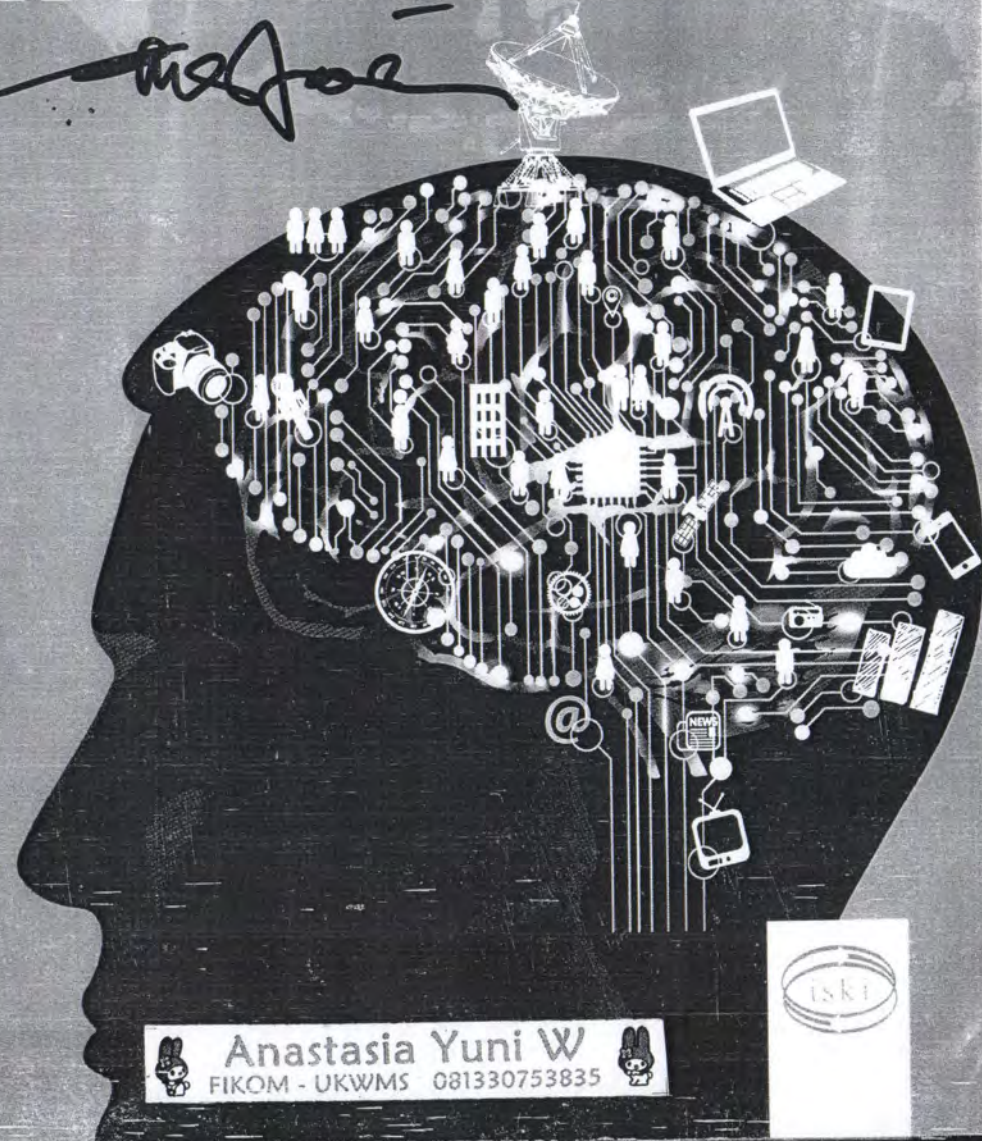


Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia

SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA

Anastasia Yuni W



Anastasia Yuni W
FIKOM - UKWMS 081330753835



**Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia:
Sistem Komunikasi Indonesia**

Editor :

Endah Murwani

Reviewer :

Billy K Sarwono

I Gusti Ngurah Putra

Cetakan Pertama:

November 2014

Diterbitkan Oleh:

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111

Tebet, Jakarta Selatan, 12810

www.iski.or.id

ISBN : 978-602-14699-6-5

DAFTAR ISI

Dasar Pemikiran Konferensi Nasional Komunikasi	vii
Pengantar Editor	xiii
Masa Depan Komunikasi Masa Depan Indonesia	
Sistem Komunikasi Indonesia	
Bagian Satu	
Kearifan Dalam Adaptasi Global	
Sistem Komunikasi Dalam Menghadapi Perkembangan Media Digital Pada Anak	
Ike Junita Triwardhani, Wulan Tri Gartanti	1
Sistem Komunikasi Indonesia Ditengah Arus Globalisasi	
Mazdalifah	25
Sistem Komunikasi Tradisional Masyarakat Yang Berbudaya Terisolir Di Cilacap	
S. Beki Istiyanto	42
Adakah Yang Asli Dalam Sistem Komunikasi Indonesia?	
Anastasia Y W	62

Pemberdayaan Energi Sosial Masyarakat Desa Melalui Komunikasi Berwawasan Nasional Ani Yuningsih	80	Implementasi Sistem Siaran Jaringan (Studi Kasus Pada Kompas Tv) Gilang Gusti Aji, Th Bambang Pamungkas	248
Sistem Komunikasi Indonesia Dewi K Soedarsono	97	Biodata Penulis	266
Mentalitas Komunikasi Irwansyah	118		
Membumikan Sistem Komunikasi Indonesia: Rekonsepsi Dan Reaktualisasi Prahastiwi Utari	140		
Komunikasi Multikultural Dan Karakter Bangsa Analisis Sistem Komunikasi Indonesia Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia (Sdm) Berkarakter Sri Sedyaningsih	154		
Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia : Sebuah Tantangan Menyambut Era Bonus Demografi Mathilda Amw Birowo	173		
Bagian Dua Konvergensi Dan Harmonisasi			
Konvergensi Dan Masa Depan Media Di Indonesia Syaifuddin, Dyah Kusumawati	199		
Media Dan Harmoni Sosial Indonesia Dorien Kartikawangi, Rayini Dahesihsari, Clara Ajisukmo, Kasdin Sihotang, Juliana Murniati	215		
Sistem Media Indonesia Dan Klientelisme Politik (Sebuah Jalan Menuju Media Yang Citizenship) Nila Fazatin	230		

ADAKAH YANG ASLI DALAM SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA?

Anastasia Y. W

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Anastasia_widya@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia, pada dasarnya merupakan negara dan bangsa *in between*. Melihat jejak sejarah yang hadir dalam kekinian memberikan bukti-bukti nyata bagaimana keindonesiaan sejatinya tidak asli. Mempertanyakan yang asli dalam konteks keindonesiaan akan mengajak kita menelusuri jejak-jejak sejarah yang amat panjang dan berliku. Paper ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Sistem Komunikasi Indonesia apakah benar-benar asli Indonesia atau pengaruh dari bangsa-bangsa yang datang dan pergi ke wilayah nusantara.

Kajian postcolonial akan digunakan untuk membaca teks untuk menjawab rumusan masalah. Homi Bhabha dalam essay-nya yang berjudul

“*Culture’s in-Between*” (Hall dan du Gay, 2003: hal. 54) menyebutkan mengenai budaya diantara. “*Culture’s in-Between*” yang diusung oleh Bhabha menyoal mengenai identitas budaya yang tidak pernah selesai pada satu konsep. Budaya yang terus bergerak, mengambil dan beradaptasi dari sekitarnya untuk kemudian meng-klaim dirinya sebagai budaya.

Paper ini diharapkan mendapatkan data mengenai keindonesiaan dalam sistem komunikasi di Indonesia. sehingga paper ini dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman sistem komunikasi Indonesia kini.

Key words: keindonesiaan, komunikasi, *postcolonial*, *culture*, media

PENDAHULUAN

Soekarno pada 1 Juni 1945 menyatakan bahwa kalau kita (Indonesia) mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup (Latif, 2012: hal.383). demokrasi yang memberi hidup adalah demokrasi yang memberi manfaat lahir bathin bagi masyarakat. Tidak sekedar mengadopsi demokrasi yang dikenalkan oleh Barat namun bagaimana demokrasi tersebut menjadi jiwa yang menghidupi dan untuk itu semestinya, demokrasi disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia. Keinginan dan semangat Soekarno tidak lepas dari keinginannya untuk lepas dari Barat dari semua segi. Sementara itu nilai-nilai demokrasi paling santer digaungkan oleh Barat. Seolah berusaha mencari bentuk demokrasi sendiri tanpa mengadopsi sepenuhnya demokrasi Barat.

Pesta rakyat baru saja usai. Pilpres 2014 menjadi sejarah penting bagi negeri ini. Seorang presiden dipilih oleh rakyat. Wacana tentang pilpres tidak saja berkuat di elit politik namun di kalangan rakyat yang tidak punya akses langsung ke elit perpolitikan negeri ini juga ikut bersitegang. Setidaknya facebook, twitter, instagram, path dan sosial media lainnya ramai dengan

update komentar dan juga suara rakyat. Pendukung Jokowi dan Prabowo pun bersitegang di sosial media.

Kemudian, demokrasi macam bagaimana sebenarnya yang sedang dicari oleh Indonesia? Sengketa Pilpres membuka pembicaraan mengenai sistem noken di Papua yang dikatakan tidak sah dalam sistem demokrasi yang sedang dijalankan oleh Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, rupanya semakin menemukan bentuk dan pertarungan wacana di kalangan elit dan juga rakyat sebagai sendi utama dari konsep demokrasi tersebut. Rakyat menjadi subyek/pelaku dalam konsep demokrasi. Misalnya, keterpilihan Jokowi, yang digadang-gadang sebagai Ratu Adil, adalah bentuk bagaimana pemimpin negeri berasal dari rakyat.

Disetujuinya RUU Pilkada yang beimplikasi pada pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung menimbulkan gejolak rakyat. Tekanan rakyat muncul dalam media sosial. Media sosial setidaknya merupakan salah satu cara untuk penyaluran suara rakyat yang tidak tertampung dalam media formal. Masyarakat menemukan celahnya untuk memberikan suara, pendapat dan masukan penting terhadap elit politik negeri ini. Tekanan rakyat tersebut setidaknya membuat gerah para elit dengan ditutupnya hashtag #ShameOnYouSBY dan adanya wacana untuk mengeluarkan Perppu berkaitan dengan hal tersebut.

Rakyat bergolak, disisi pemilihan presiden, ada semangat yang optimis bahwa seseorang dari rakyat bisa menjadi pemimpin negeri. Hal itu seperti mimpi semua anak di negeri ini mengenai cita-cita kelak yaitu menjadi presiden. Presiden sebelumnya bukan berarti tidak dari rakyat, namun konsep rakyat disini dimaknai adalah rakyat biasa bukan elit di negeri ini. Selain Soekarno dan Soeharto, Jokowi adalah presiden yang berangkat dari rakyat (bawah). Situasi ini memberikan peluang bahwa seseorang dari rakyat

bisa memimpin negeri ini. Karena dengan begitu diharapkan dia benar-benar membawa suara dari rakyat. Meskipun secara hukum, yang disebut dengan rakyat yang berstatus WNI, namun situasi politik memunculkan dikotomi elit dan rakyat.

Gagasan akan kerakyatan yang mengusung dari-oleh-untuk rakyat muncul sering dengan dinamika negeri ini yang membentuk formasi Negara kesatuan Republik Indonesia (Latif, 2012: hal 387). Sebagai sebuah entitas politik yang baru saja porak poranda oleh imperialisme fisik, NKRI mencari bentuk yang sesuai dengan karakternya. Sebagai sebuah negara dan bangsa keberadaan tidak luput dari konsep *culture's in between* yang digagas oleh Homi Bhabha (Hall and du Gay, 1996: hal 53). Pembentukan karakter ini menjadi perdebatan di era kekinian, mempertanyakan ulang bentuk pemerintahan yang sesuai dengan Indonesia. Demokrasi yang diinginkan Soekarno hendaknya tidak mengadopsi Barat, pada kenyataannya, globalisasi setidaknya membawa homogenisasi terhadap sistem pemerintahan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Pembicaraan mengenai pencarian Indonesia dalam Sistem Komunikasi Indonesia ini mencuat ketika persoalan RUU Pilkada menjadi santer dan menjadi agenda politik yang menjadi perbincangan saat ini. Persoalan langsung dan tidak langsung, lepas dari kebutuhan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan, pembicaraan mengenai RUU Pilkada ini mengusik keingintahuan mengenai Sistem Komunikasi yang sekarang ini berlaku di Indonesia.

Indonesia dengan karakter dominan kolektivitas merujuk pada pembicaraan mengenai segala sesuatu dibicarakan bersama, dilakukan bersama, kebijakan adalah keputusan kolektif. Oleh karena itu 'gotong royong' menjadi bagian penting dan utama dalam pembicaraan mengenai demokrasi di Indonesia. unsur gotong royong secara eksplisit mewujud dalam sila ke-empat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Permusyawaratan atau perwakilan adalah bentuk paling jelas dari gotong royong. Bersama-sama secara kolektif untuk mengambil suara untuk rakyat dengan penuh kebijaksanaan.

Kata gotong royong disematkan dalam berbagai bentuk kegiatan di Indonesia. Ada rumah sakit menggunakan kata gotong royong, organisasi menggunakan kata gotong royong, bahkan sampai nama kabinet mengusung gotong royong. Gotong royong menjadi bagian utama dari sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep gotong royong bahkan tidak saja mewujud dalam kegiatan yang bersifat fisik namun menjadi konsep yang merujuk pada konsep-konsep yang *intangible* seperti demokrasi. Gotong royong di wilayah nusantara tidak lepas dari budaya kolektifitas.

Dalam perspektif historis, kolektifitas tidak bisa dipisahkan dari kehidupan rakyat Indonesia. Menurut Hatta (Latif, 2012: hal 386), ada tiga sumber yang menghidupkan budaya demokrasi terutama pada para pemimpin pergerakan. Pertama, tradisi kolektifisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

Berdasarkan latar belakang inilah maka dalam paper ini akan menjabarkan beberapa fenomena komunikasi dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk kemudian dicari akar historis maupun kontekstualnya apakah sistem komunikasi tersebut merupakan buah dari wacana yang berkembang di nusantara ataukah ada sumbangsih dari negara- bangsa lain mengingat Indonesia merupakan wilayah *in-between* di dalam peta geopolitik dunia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perspective Historis Sistem Komunikasi Indonesia

Setidaknya ada 4 (empat) pendekatan dalam memahami Sistem Komunikasi Indonesia yaitu pendekatan sejarah, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis dan pendekatan sistem (Sumarno, 2008: modul 2.1). Memahami Sistem Komunikasi Indonesia secara menyeluruh dari 4 pendekatan tersebut mendiskusikan kembali apakah sistem komunikasi Indonesia merupakan salah satu bagian dari sistem komunikasi yang beredar di dunia kini yaitu sistem otoriter, liberal, tanggungjawab masyarakat dan komunis (Sumarno, 2008: modul 2.1) ataukah merupakan bagian yang berbeda dari keempat sistem komunikasi tersebut.

Pendekatan sejarah, akan menggunakan kajian pada sistem komunikasi pada 3 kerajaan besar yaitu Sriwijaya sebagai negara maritim dengan corak Buddha, Majapahit sebagai kerajaan besar di wilayah nusantara dengan corak Hindu dan kerajaan Mataram dengan corak Islam. Kondisi geografis wilayah nusantara yang agraris dan maritim memberi pengaruh bentuk komunikasi yang berkembang di 2 wilayah dengan kontur berbeda tersebut. Wilayah agraris. Kerajaan Sriwijaya yang berada di hulu Sungai Musi mengembangkan diplomasi melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan itu pula, sriwijaya mengembangkan komunikasi dengan beberapa negara yaitu Cina, India, dan beberapa negara di kawasan Asia tenggara. Sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya menggunakan strategi sentralis yang mengendalikan kegiatan pelabuhan yang berada di wilayah kekuasaannya. Distribusi mengalir dari dari pusat kerajaan untuk memperkokoh kekuasaan pusat kerajaan, (Sumarno, 2008: modul 2.6).

Sedangkan sikap rakyat terhadap kerajaan cukup respect. Sikap tersebut dipengaruhi oleh dogma agama Budha sebagai agama yang dianut oleh kerajaan dan rakyat kerajaan. Dalam agama Budha tidak mengenal kasta, sehingga komunikasi antara rakyat dan rajanya terpelihara dengan baik.

Arus komunikasi mengalir dalam sistem birokrasi kemaritiman yang dapat mengembangkan nuansa berpikir dan bertambahnya kualitas rujukan masyarakat kerajaan (Sumarno, 2008: modul 2.6).

Rujukan kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Majapahit. Pemerintahan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan teritorial yang disentralisasikan ke dalam birokrasi secara rinci. Raja memegang otoritas politik, pengelola sumber-sumber komunikasi tertinggi yang menduduki hirarki puncak kerajaan. Proses komunikasi mengalir menurut struktur birokrasi secara berjenjang sampai ke rakyat kerajaan (Sumarno, 2008: modul 2.11).

Alur komunikasi bergerak secara vertikal mengalir dari atas ke bawah dan secara horizontal antara pejabat-pejabat tinggi kerajaan di dalam merumuskan seluruh kebijaksanaan raja sampai kepada pelaksanaan perintah ke tingkat bawah yaitu raja-raja di daerah. Ada *feedback* antara rakyat dengan raja namun tidak langsung ke pusat kerajaan tetapi disalurkan melalui kerajaan di daerah. *Feedback* tersebut digunakan bahan laporan raja-raja di daerah kepada Sri Maharaja ketika raja-raja di daerah menyerahkan upeti pada pusat kerajaan (Sumarno, 2008: modul 2.12).

Kerajaan ketiga yang menjadi rujukan adalah Mataram II setelah masuk pengaruh Islam ke wilayah nusantara. Sistem komunikasi kerajaan Mataram II cenderung mengarah ke demokratisasi komunikasi. Komunikasi berkembang bebas dan terbuka baik secara vertikal an horizontal. Rakyat dapat menyatakan pendapat, kehendak dan aspirasinya walaupun masih dalam batas etika Islam (Sumarno, 2008: modul 2.13).

Literatur lainnya yang membahas tentang Sistem Komunikasi Indonesia adalah Nurudin (2004). Nurudin (2004) menyebutkan bahwa, mempelajari SKI ini menjadi rumit karena berusaha untuk menunjukkan kekhasan sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Untuk itu, dia membaginya dalam beberapa subpokok bahasan dalam memahami Sistem Komunikasi Indonesia, yaitu, ruang lingkup, pendekatan sistem, sistem pers, *opinion*

leader, teknologi komunikasi internet, dll. Meskipun di subbab dipaparkan sekilas mengenai pola komunikasi interpersonal, kelompok dan massa, namun kekhasan sistem komunikasi belum menemukan keunikannya.

Sedangkan Yudi Latif (2012) mengajukan 3 stimulus untuk memahami demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dan Stimulus Barat. Demokrasi desa berdasarkan catatan Mohammad Hatta dalam Latif (2012: hal. 413), penghayatan atas tradisi permusyawaratan dan gotong royong dari masyarakat desa khususnya nagari (di tanah Minang) menjadi landasan yang kuat untuk memahami masa depan demokrasi di nusantara. Menurut Hatta, meskipun kata demokrasi berasal dari wilayah Yunani yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Barat, namun nilai-nilai tersebut sudah mengakar lama dalam tradisi masyarakat di nusantara.

Stimulus Islam dalam pandangan Soekarno bahwa Islam membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis (Latif, 2012: hal. 389). Nilai-nilai demokrasi Islam berasal dari akar teologisnya yaitu pengakuan Islam akan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah adanya kederajatan manusia dihadapan Allah sehingga adanya pelarangan dan perendahan martabat manusia dihadapan Allah, (Latif, 2012: hal. 389-390).

Sedangkan stimulus Barat, mengajak kembali ke demokrasi berasal kata dari bahasa Yunani. Pengaruh para pemikir di Yunani berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi partisipatif yang berkembang sekitar abad ke-5 SM (Latif, 2012: hal. 395). Sejarah panjang demokrasi di Barat memberikan landasan global mengenai demokrasi yang kini banyak diterapkan di seluruh penjuru dunia. Praktek imperialisme Barat yang membawa kabar mengenai demokrasi memberikan kontribusi besar dalam proses penyebaran konsep demokrasi Barat ke wilayah Nusantara .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode kajian literatur berdasarkan fenomena berbagai pemberitaan seputar Pilpres, RUU Pilkada dan juga update di media sosial berkaitan dengan kedua hal tersebut.

HASIL PENELITIAN/ANALISA

Demonstrasi Fisik, Sebagai Cara Berkomunikasi dengan Elit

Keberhasilan tekanan massa di kisaran 1997-1998 yang berujung pada turunnya rezim pada waktu itu memberikan angin dan warna baru perpolitikan negeri ini. Masyarakat dengan mudah dapat menyuarakan pendapatnya dan memberikan tekanan kepada elit. Reformasi, istilah yang digunakan untuk menyebutkan era setelah turunnya rezim orde baru. Inti dari tuntutan massa pada saat itu adalah kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan seperti yang diatur dan dilindungi oleh UUD. Setidaknya 15 tahun terakhir ini, berbagai unjuk rasa massa menyorakan pendapat banyak ditemui di negeri ini dalam berbagai sendi.

Unjuk rasa tidak lagi berkaitan dengan urusan politik antara rakyat dengan elit politik, namun juga ke persoalan sosial masyarakat lainnya seperti lingkungan hidup antara masyarakat dengan korporasi. Angin segar reformasi memberi ruang dan semangat baru di negeri ini setelah dibungkam sekian lama.

Media Sosial, berbicara tanpa keringat.

Stimulus Barat terhadap kehidupan demokrasi tidak dapat dipungkiri karena perkembangan teknologi yang pada implikasinya menghadirkan globalisasi budaya ke segala penjuru dunia. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi tidak luput menjadi bagian sarana masyarakat untuk mengekspresikan dirinya ketika saluran-saluran mainstream dianggap sebagai institusi media yang tak lagi dapat menampung suara warga.

Gerakan hashtag #ShameOnYouSby tak luput membuat warga negara dunia ikut bersama dengan seluruh warga Indonesia untuk mendorong demokrasi di Indonesia untuk kembali berpihak kepada rakyat. Gerakan hashtag #Jkw4Presiden atau sejenisnya juga menjadi gerakan moral dari berbagai elemen untuk mendorong popularitas Jokowi untuk memenangi pemilihan presiden. Dukungan juga mengalir dari artis luar negeri seperti Sting dan Arkarna.

Keberadaan situs change.org juga memberikan kontribusi terhadap demokrasi. Change.org merupakan situs yang memuat berbagai petisi yang mendorong perubahan dalam kebijakan publik. Misalnya gerakan penggalangan dukungan terhadap petisi tolak RUU pilkada, tolak kekerasan pada anak, dll. Change.org merupakan situs yang nisa diakses oleh siapapun dan gratis.

Dorongan gerakan sosial melalui media online sebagai bentuk dari ungkapan-ungkapan warga yang sulit nuntuk menembus media mainstream. Keberadaan petis, mention, hashtag dan sejenisnya sebaiknya menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk mengetahui respon warga atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Islam dan Demokrasi

Dalam jejak pendapat Kompas yang dimuat pada 1 September 2014 mengenai keberadaan PKB sebagai partai yang berafiliasi Islam, menunjukkan bahwa PKB merupakan partai yang bersifat terbuka dan telah memperjuangkan aspirasi rakyat. PKB dianggap sebagai partai yang memperjuangkan Islam moderat.

Dalam jejak pendapat tersebut juga terungkap bahwa, PKB berhasil menciptakan wajah Islam yang humanis, dinamis, terbuka serta turut serta membangun demokrasi di Indonesia. Dalam Muktamar PKB 2014 yang diselenggarakan di Surabaya (Kompas, 1 September 2014) PKB kembali ingin menegaskan dirinya sebagai partai yang berperan aktif dalam

memajukan bangsa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dalam berdemokrasi. “*Rahmatan Lil’Alamin*” yang menjadi tema multamar tersebut kembali menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia berpandangan moderat dan cinta damai, tetapi masih cenderung diam. Umat Islam harus membangun identitas dirinya sebagai pembawa damai, menawarkan solusi dan tidak menjadi bagian dari masalah.

Hal sebaliknya yang dikibarkan oleh kelompok Front Pembela Islam, yang seringkali menghadirkan aksi yang pada akhirnya mengundang permusuhan dan kekerasan. Aksi demonstrasi yang dilakukan seringkali juga menghadirkan militer dalam skala besar dimana hal tersebut mengindikasikan adanya ketegangan yang mungkin terjadi akibat aksi demonstrasi tersebut. Bahkan Tempo.co pada berita “Ini rekam jejak perilaku FPI” yang diunggah pada 10 Oktober 2014 (www.tempo.co/read/news/2014/10/10/064613290/Ini-Rekam-Jejak-Perilaku-FPI) menyajikan data berkaitan dengan aksi yang pernah dilakukan oleh FPI sejak 1999, misalnya:

September 1999:

Laskar Pembela Islam menutup tempat perjudian di Petojo Utara serta tempat pelacuran di Ciputat dan Tanah Abang.

4 Mei 2001:

Massa FPI mendatangi studio *SCTV* Jakarta. Mereka memprotes penayangan telenovela *Esmeralda*, yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama Fatimah. FPI khawatir citra buruk Fatimah bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatimah Azahra, putri Nabi. Akhirnya, *SCTV* menghentikan penayangan telenovela tersebut.

20 April 2003:

Pimpinan FPI, Habib Rizieq, ditahan karena dianggap menghina kepolisian lewat dialog di *SCTV* dan *Trans TV*. Ia sempat dibawa kabur pendukungnya, tapi akhirnya divonis 7 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 29 Juli 2003.

12 April 2006:

FPI menyerang dan merusak kantor majalah *Playboy*.

4 Mei 2012:

FPI membubarkan diskusi Irshad Manji di Salihara, Jakarta. Diskusi ini berkaitan dengan peluncuran buku *Allah, Liberty & Love: Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan, Suara Baru Reformis Muslim Kontemporer*. Mereka menuduh buku itu berisi pemikiran sesat.

28 Juni 2013:

Juru bicara FPI, Munarman, menyiram secangkir air kepada pengamat sosial, Tamrin Amal Tomagola, saat keduanya hadir sebagai narasumber dalam perbincangan dalam acara *Apa Kabar Indonesia Pagi*, yang disiarkan secara langsung oleh *TV One*. Keduanya dihadirkan untuk membahas pelanggaran *sweeping* di tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.

dll

Aksi FPI seringkali menandung unsur kekerasan dan penolakan akan pluralitas di Indonesia. Beberapa aksinya menolak kontes waria, diskusi keagamaan yang dianggap tidak sepaham dengan FPI, persoalan Ahmadiyah, bahkan artis komersial pun juga menjadi bagaian dari aksi jalannya. Tak heran, pada setiap aksinya selalu ada unsur militer dan polisi dengan skala besar untuk menjaga keamanan tetap kondusif.

DISKUSI

Apakah sistem komunikasi Indonesia berkaitan dengan sistem pers di negara-negara? Ataupun sistem pers dan sistem komunikasi ini berkaitan dengan demokrasi? Bagaimana pengaruh dari kehadiran agama-agama (yang notabene) datang dari luar wilayah nusantara? Katakanlah Islam, sebagai agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia, bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia? Berikut ini, jbaran singkatnya.

Negeri tanpa telinga dan mata.

Tulisan Indra Tranggono dalam kolom opini Kompas 14 Agustus 2014 berjudul: Pasca Episode 'Negeri Tanpa Telinga' kembali mengingatkan bagaimana pemerintah yang berkuasa seperti pemerintah yang tak bertelinga. Orang yang tak bertelinga adalah orang yang tidak bisa mendengar, bukan saja tidak mampu mendengar dengan baik, namun benar-benar tidak punya kemampuan mendengar. Ketika kampanye, calon presiden meminta telinga rakyat untuk mendengarkan program-program pemerintahannya kelak. Namun, sayangnya setelah menjadi pemerintah (yang dipilih rakyat) telinga para pemimpin tersebut seolah hilang dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendengarkan.

Sementara hakekat demokrasi adalah dari-oleh-dan untuk rakyat. Meskipun (seluruh) rakyat diminta untuk memberikan andil secara aktif dalam pemilihan umum namun tidak semena-mena bahwa seluruh rakyat akan ikut menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan 'untuk rakyat' akan menjadi pertanyaan dan dinamika politik hingga periode berikutnya. Artinya, konsep 'dari rakyat' saja dari 3 pilar makna demokrasi yang mampu dilaksanakan. Presiden yang datang dari rakyat tentu saja akan membawa serta menyelesaikan agenda rakyat yang tidak terselesaikan dengan keputusan-keputusan kebijakan yang populis-memihak rakyat.

Rakyat menggunakan berbagai cara untuk menekan pemerintahan agar kebijakan-kebijakannya semata-mata untuk rakyat. Atau juga ketika pemerintah yang berkuasa, tidak lagi mendengarkan rakyat, maka rakyat akan bersuara memberikan pendapatnya meskipun tidak diminta dan kemungkinannya besar tidak didengarkan. Trauma-trauma pengalaman politik dengan 'tidak didengarkan' selalu akan menjadi beban pemerintah yang berkuasa manakala kembali ke pola-pola narsistik. Indra Tranggono (Kompas, 14 Agustus 2014) menyebutnya sebagai 'rezim narsistik' yang lebih dari manekin-manekin yang *nangkering* di etalase mal kekuasaan dan

tidak pernah mencium 'harum' penderitaan rakyat. Mereka hanya pamer gebyar cahaya pasar, sementara rakyat hidup tersuruk dalam kegelapan tanpa masa depan.

Ricuh mengenai RUU Pilkada menjadi tolak ukur mengenai pemaknaan demokrasi kekinian di Indonesia. Pemerintah hasil dari Pilihan langsung justru menyetujui pemilihan tidak langsung. Rakyat tidak tinggal diam. Tekanan terhadap pemerintah tidak lagi dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan namun kini dilakukan secara sporadis dari berbagai sudut dengan cita-cita yang diamini bersama tanpa ada kesepakatan awal yang dirumuskan.

Islam dan Kontribusinya terhadap Demokrasi di Indonesia

Sidang Ke-131 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa Swiss mendapatkan angin segar dengan promosi Islam dan Demokrasi di Indonesia (Kompas, 13 Oktober 2014). Dalam artikel tersebut diungkapkan oleh ketua delegasi Indonesia, Nurhayati, bahwa negara-negara barat memberikan stigma mengenai penduduk mayoritas Muslim tidak memberikan tempat kepada perempuan untuk menjadi pemimpin. Issue tersebut oleh Nurhayati ingin didobrak dengan pengajuan dirinya sebagai ketua IPU untuk masa mendatang.

Barat memandang negara-negara Islam sebagai terbelakang dari segi demokrasi. Universitas Barat akan demokrasi berusaha untuk terus digaungkan ke segala penjuru. Namun alih-alih untuk memperadabkan masyarakat Timur dengan demokrasi, yang terlihat justru usaha untuk homogenisasi terhadap nilai-nilai demokrasi. Negara-negara Islam begitu mendapatkan apresiasi yang luar biasa ketika Arab Spring mendapatkan sambutan positif dari warganya sendiri. Arab Spring adalah simbol demokrasi barat yang semakin mendapatkan pengakuan dan tempat di negara-negara Islam.

Penelitian yang dilakukan Indonesianis mengenai Islam di Indonesia mengarah kepada kaitan Islam dan ruang publik. Robert W. Heffner dkk dalam artikel yang dimuat pada 1977 menganalisis pertarungan ideologis antara pendukung majalah *Media Dakwah* yang diterbitkan oleh Dewan dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan koran *Republika* yang didukung oleh para aktivis Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Mujiburrahman, 2008: hal. 50).

Sedari awal masuk ke wilayah nusantara, Islam telah memberikan stimulus dalam wacana mengenai demokrasi. Dalam pandangan Wertheim (1956) dalam Latif (2012: hal. 393), stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistik berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang egaliter. Karakter masyarakat Nusantara yang terbuka memberi ruang bagi benih-benih persemaian demokrasi tumbuh subur. Selain itu, kehadiran demokrasi desa yang telah ada terlebih dahulu memberi ruang terbuka benih-benih demokrasi tersebut (Latif, 2012: hal. 394).

Gagasan mengenai pluralitas akhirnya mengemuka ketika beberapa kelompok Islam memaksakan Indonesia untuk melakukan dan menegakkan hukum berdasarkan syariat Islam. Wacana-wacana mengenai pluralitas dan perjuangan terhadap hal tersebut terus ada dalam konsep demokrasi Indonesia. Setidaknya dalam demokrasi, ruang-ruang komunikasi dimungkinkan untuk dihadirkan. Pluralitas Indonesia begitu luar biasa mulai dari keberagaman etnisitas yang membawa dampak terhadap keberagaman bahasa, pola komunikasi, gaya berbusana, kuliner hingga ke persoalan bangunan fisik; keberagaman keyakinan, mulai dari agama samawi yang tidak berasal dari budaya nusantara, filsafat timur yang diwakili Buddha serta banyak aliran kepercayaan seperti Tao, Konghucu, serta berbagai aliran yang tidak terwadahi dalam pengelompokan agama yang diakui pemerintah; warna kulit yang berimplikasi pada ras yang berkembang di Indonesia;

pluralitas yang berkaitan dengan seksualitas juga sedang mengemuka. Berbagai kelompok dengan afiliasi terhadap LGBT juga menemukan ruang untuk berekspresi.

Mujiburrahman (2008: hal. 44), menyebutkan bahwa di titik tersebut adalah sangat penting untuk memahami pluralisme di Indonesia. Mujiburrahman menjelaskan bahwa pluralisme adalah suatu pandangan yang positif terhadap keberagaman, disertai usaha yang sungguh-sungguh untuk mengelola keberagaman tersebut secara damai dan berkeadilan.

Keberagaman yang menjadi hakekat keberadaan Indonesia sebenarnya merupakan kekayaan kajian yang luar biasa. Keberadaan kelompok-kelompok yang memberi warna terhadap keterbukaan berpikir-berpendapat seperti yang diatur oleh UUD 1945 seperti Front Pembela Islam, kelompok garis keras yang membela rejim militer, ataupun kelompok-kelompok penekan yang memberikan wacana kepada publik, media dan pemerintah legislator. Aksi-aksi penekan ini hampir setiap hari menjadi *content* media.

Sebagai bagian dari generasi yang dilahirkan pada era demokrasi, kehadiran-kehadiran wacana-wacana penekan justru dirasakan memberi hidup dan kesempatan bagi demokrasi untuk menemukan identitasnya. Ketakutan-ketakutan akan kelompok yang membawa wacana penekan adalah sebuah sikap yang justru bertolak belakang dari demokrasi. Namun disisi lain, ketakutan tersebut juga bagian dari wacana demokrasi. Dimana konsep 'takut' adalah konsep yang bertolak belakang dari konsep kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Internet, harapan di tengah kebuntuan.

Harapan pada internet sebagai bagian dari demokrasi semakin terlihat ketika euforia anak muda sebagai pengguna internet memanfaatkannya sebagai bagian dari penyaluran aspirasi politiknya. Belajar dari Arab Spring, keberadaan internet tidak lagi sebagai bagindari bentuk alat

komunikasi modern, namun juga mapu menjadi kelompok penekan yang bersifat virtual.

KESIMPULAN

Konsep Sistem Komunikasi Indonesia rupanya terlalu luas jika kemudian dikerdilkan dengan sistem pers di Indonesia. Sistem Komunikasi Indonesia terlalu kompleks di berbagai ranah jika hanya dipersempit dengan wacana-wacana yang muncul di media. Sementara 'Indonesia' dalam konsep Sistem Komunikasi Indonesia perlu dikaji ulang, apalagi jika kajian terhadap hal tersebut kemudian mengarahkan seolah-olah konsep sistem komunikasi adalah asli produk Indonesia.

Pers merupakan pilar penting sebagai ajang untuk penyaluran aspirasi (terutama) rakyat kepada para pembuat regulasi dan eksekutif negeri. Tanpa Pers, demokrasi yang digaungkan Barat sebagai bentuk modernisasi masyarakat Timur kesulitan untuk menemukan bentuknya. Pers sekaligus sebagai alat rekam jejak sejarah yang sangat penting. Melalui Pers, memory kolektif bangsa ini terdokumentasikan dengan baik. Suatu saat memory kolektif tersebut dapat dipanggil kembali sebagai bentuk pembelajaran demokrasi di negeri ini.

Perlu mendesak untuk dirumuskan ulang mengenai keindonesiaan yang ditawarkan dalam konsep tersebut. Melalui telusur ke masyarakat-masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan dan masih menggunakan hukum adat sebagai bagian dari bentuk demokrasi yang asli dikembangkan masyarakat Indonesia. Sementara itu demokrasi adalah salah satu bentuk pola komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

Yudi latif (2012: hal. 387-402) merumuskan ada 3 stimulus dalam demokrasi yaitu stimulus demokrasi desa, stimulus Islam dalam demokrasi dan stimulus Barat dalam demokrasi. Ketiga stimulus tersebut menemukan

bentuknya dalam Sistem Komunikasi Indonesia. Sehingga, pertanyaan awal penelitian ini mengenai adakah yang asli Indonesia dalam Sistem Komunikasi Indonesia setidaknya dijawab dengan yang asli itu tidak ada. Yang ada adalah Indonesia sebagai negara *in between* yang menerima berbagai masukan dari berbagai penjuru dalam merumuskan keberadaan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, Stuart. du Gay, Paul. 1996. *Questions of Cultural Identity*. Sage. US
- Latif, Yudi. 2012. Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila). Gramedia. Jakarta
- Mujiburrahman, DR. 2008. Mengindonesiakan Islam representasi dan Ideologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Sumarno, AP, dkk. 2008. Sistem Komunikasi Indonesia. Universitas Terbuka. Jakarta.

Website

- Kompas.com
Tempo.co
SKH Kompas